

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta 2007.
- Gandy Wahyu Maulana Zulma. Saring Suhendro. Azola Degita Azis. *Praktikum dan Konsep: Pajak Bumi Bangunan (PBB). Bea Perolehan Hak Atas Tanas dan Bangunan (BPHTB). Bea Materai (BM). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)*. Mitra Wacana Media. Jakarta 2021.
- Gunadi. *Aspek Hukum dalam Perpajakan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2006.
- Gunawan Widjaja. *Hak Tanggungan: Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi dalam Praktik*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama. Bandung. 2008.
- , *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Mandar Maju. Bandung. 2009.
- Herlien Budiono. *Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Mutlak*. Majalah Renvoi. edisi tahun I. No 10. Bulan Maret 2004.
- Irwansyah. editor Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum. Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta. 2021.
- Jan Michael Otto. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Terjemahan Tristam Moeliono. Komisi Hukum Nasional. Jakarta. 2003.
- Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra aditya Bakti. Bandung. 2001.

- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2008.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2013.
- Rochmat Sumitro. *Asas dan dasar perpajakan*. Eresco. Bandung. 1990.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999.
- R. Subekti. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta. 2008.
- , *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta. 2014.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press. Jakarta. 2006.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2001.
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat. Universitas Indonesia. Jakarta. 1999.
- Syahrudin Nawi. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. UMITOHA. Makassar. 2021.

Tesis

- FITRI SUSANTI. *Praktek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris Di Jakarta Timur*. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. 2008.

Iva Latifah Permana. *Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Didasari Dengan Perjanjian Utang Piutang Terhadap Para Pihak Dan Notaris*. Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2023.

M. Syahrul Borman. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Doktor Soetomo. Vol. 3 No. 1 Februari 2019

Muliani. *perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuat dibawah tangan sebagai jaminan kredit pemilikan rumah*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2020.

N. Dewi Ratna Sari. *Analisis Hukum Terhadap Akta Notaris Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)*. Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 2021.

RAMDHANI HIDAYAT. *Kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah dibawah tangan yang telah di waarmerking*. Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung. 2022.

Jurnal

I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 8, 2018

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Mahkamah Agung:

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 563 K/Pdt/2005.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 291 K/Pdt/2010*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1306 K/Pdt/2015.*